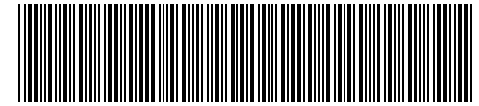




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.578851/2024**



DS:2474-3514-9459-5907

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 3. Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 4. Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
- Sebesar : Rp. 51.910.000 (LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang
Rp. 51.910.000
Rp. 51.910.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	51.910.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A L U (051) Rp. 51.910.000

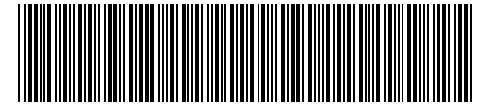
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2474-3514-9459-5907

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			51.910.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			51.910.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		2. 01	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		3. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 01	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		5. 02	-			
		6. 02	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan			
		7. 02	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
		8. 03	-			
		9. 03	Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	18.400.000
Rincian Output	:	01	AEA.003 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	18.400.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	510.000
Rincian Output	:	01	BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,00	Perkara	510.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang	33.000.000

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

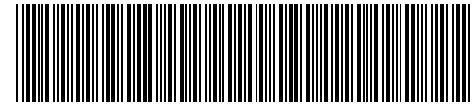
ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2024

I B. SUMBER DANA



DS:2474-3514-9459-5907

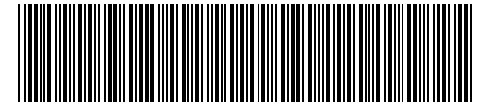
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	51.910.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	51.910.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2474-3514-9459-5907

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Kewenangan : (KD)

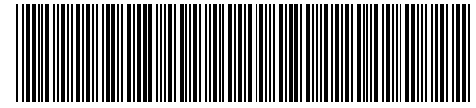
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
578851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	-	51.910	-	-	-	51.910		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	51.910	-	-	-	51.910		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	51.910	-	-	-	51.910		
1059.AEA	Koordinasi (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	18.400	-	-	-	18.400	18 . 51	
01	RM	-	18.400	-	-	-	18.400	051	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	510	-	-	-	510	18 . 51	
01	RM	-	510	-	-	-	510	051	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	33.000	-	-	-	33.000	18 . 51	
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000	051	
JUMLAH		-	51.910	-	-	-	51.910		

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2474-3514-9459-5907

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (578851) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

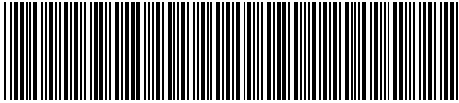
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	578851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.550	3.563	3.451	3.238	3.301	6.702	3.501	3.151	4.289	3.108	8.769	7.287	51.910
		BELANJA BARANG	1.550	3.563	3.451	3.238	3.301	6.702	3.501	3.151	4.289	3.108	8.769	7.287	51.910
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1.550	3.563	3.451	3.238	3.301	6.702	3.501	3.151	4.289	3.108	8.769	7.287	51.910
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.550	3.563	3.451	3.238	3.301	6.702	3.501	3.151	4.289	3.108	8.769	7.287	51.910
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.621	31.177
		- PNB (425232)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	77	880
		- PNB (425233)	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	790	9.370
		- PNB (425239)	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.754	20.927

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2024
IV A. B L O K I R**



DS:2474-3514-9459-5907

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [578851] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.578851/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:2474-3514-9459-5907

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [578851] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
PLT. DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
NIP. 196805231992121002